

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

TESIS

Oleh

**M. ROBBY CANDRA
2002190018**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Jakarta

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

TESIS

Diajukan untuk persyaratan akademik guna memperoleh gelar Megister Hukum Program
Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**M. ROBBY CANDRA
2002190018**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Jakarta

2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Robby Candra
NIM : 2002190018
Program Studi : Hukum
Program Megister : Program Pascasarjana
Kosentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku jurnal acuan yang tertara di dalam referensi pada tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar tesis di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertara di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 April 2022



M. Robby Candra



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Oleh:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Robby Candra
NIM : 2002190018
Program Studi : Hukum
Program Megister : Program Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Bisnis

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum, Program Megister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta: 28 April 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi Megister Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, S.Si., M.Si.

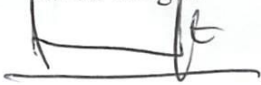


PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 April 2022, telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : M. Robby Candra
NIM : 2002190018
Program Studi : Hukum
Program Megister : Program Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Bisnis

termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 28 April 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Program Pascasarjana

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Robby Candra
NPM : 2002190018
Program Studi : Hukum
Program Megister : Program Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi
Kasus Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Menyatakan:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 28 April 2022



M. Robby Candra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka. Penulis dapat menyelesaikan dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor:188/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.)”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascaarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) Program Studi Hukum Program Megister Progaram Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di Program Studi Hukum, Program Megister Progaram Pascasarjana, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kekurangan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Ibu saya Siti Patimah yang selalu mendoakan saya dan sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga Keluarga Besar saya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH.,M.H.,M..B.A. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

4. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. Selaku pembimbing tesis satu yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan khususnya mengenai perlindungan hukum kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
5. Ibu Dr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing tesis dua yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan yang detail dan komprehensif mengenai metode penelitian, dan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
6. Bapak Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H., Selaku salah satu dosen penguji tesis saya, yang mana di tengah-tengah kesibukannya, telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan dan perbaikan mengenai status kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pemabyaran Utang (PKPU).
7. Kepada Kepada seluruh dosen-dosen dan beserta seluruh stuff Megister Ilmu Hukum (MIH) yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan Tahun 2020 Megister Ilmu Hukum (MIH) yang selalu memberi dukungan dan doa untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan doa dan serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segara rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 28 April 2022

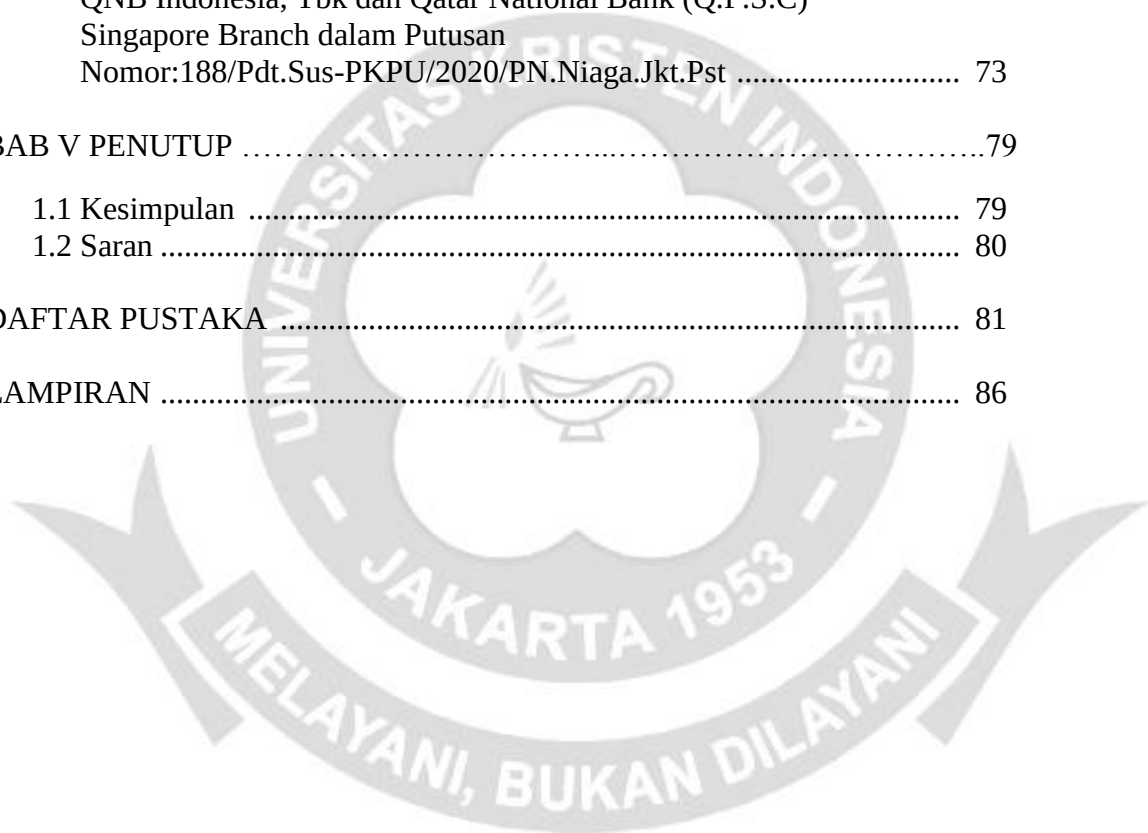
M. Robby Candra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Perumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sitematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
1.1 Teori Perlindungan Hukum	13
1.2 Teori Keseimbangan Kepentingan.....	15
1.3 Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	19
1.4 Asas-Asas Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	20
1.5 Pihak-Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	25
1.6 Syarat dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...	30
1.7 Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	35
1.8 Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	37
1.9 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	38
 BAB III STATUS KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	 40
1.1 Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	40
1.2 Kedudukan Istimewa Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	45
1.3 Hak-Hak Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	49
1.4 Penghitungan Hak Suara Kreditor Separatis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Suara Kreditor	52
1.5 Analisis Status Kreditor Separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	53

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS PT. QATAR NATIONAL BANK DAN QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C) SINGAPORE BRANCH DALAM PUTUSAN NOMOR: 188/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT

.....	57
1.1 Kasus Posisi	57
1.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	65
1.3 Amar Putusan	66
1.4 Analisis Tentang Hak Suara Tagih Yang Diterima Namun Tanpa Hak Suara Dalam PKPU	67
1.5 Analisis Pertimbangan Penetapan Hakim Pengawas Dalam Putusan Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	69
1.6 Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Separatis PT. Bank QNB Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch dalam Putusan Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	73
BAB V PENUTUP	79
1.1 Kesimpulan	79
1.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



ABSTRAK

Di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) biasanya terdapat perselisihan antara kreditor dengan debitornya. Debitor PKPU keberatan atas tagihan yang diajukan kreditor separatis. Terhadap hal tersebut Hakim Pengawas akan memberikan penetapannya di dalam PKPU, namun penetapan Hakim Pengawas tersebut terkadang merugikan kreditor separatis di mana menerima tagihannya namun tanpa hak suara dalam proses PKPU. Bagaimanakah status kreditor separatis dalam PKPU dan bagaimanakah perlindungan hukum kreditor separatis perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Tujuan penelitian untuk mengetahui status kreditor separatis dalam PKPU dan perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdara, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Suara Kreditor, dan putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahan sekunder: buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan PKPU dan bahan hukum tersier: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Hasil penelitian ini a). status kreditor separatis kreditor separatis di dalam PKPU berkedudukan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya, yang memiliki hak-hak seperti ikut serta dalam *voting* atau pemungutan suara baik itu untuk memberikan PKPU tetap atau proposal perdamaian di dalam PKPU, b) perlindungan hukum kepada kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, TBK dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima dan diakui hak tagihnya oleh Hakim Pengawas dan Pengurus dalam PKPU mendapatkan perlindungan hukum yakni mendapatkan hak-haknya yang telah diberikan oleh Pasal 229 huruf b *juncto* 281 huruf b UU Kepailitan dan PKPU yaitu mendapatkan hak suara, dan dapat untuk ikut serta dalam *voting* atau pemungutan suara terkait dengan pemberian PKPU tetap dan proposal perdamaian yang diajukan debitor PKPU.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

ABSTRACT

In The Suspension Of Debt Payments there are usually disputes between creditors and debtors. Suspension of Debt Payments debtors object to claims submitted by separatist creditors. Regarding this matter, the Supervisory Judge will give its determination in the Suspension of Debt Payments, but the stipulation of the Supervisory Judge is sometimes detrimental to separatist creditors who receive their bills but without voting rights in the Suspension of Debt Payments process. What is the status of separatist creditors in Suspension of Debt Payments and how is the legal protection of separatist creditors? legal protection of separatist creditors of PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch whose claim rights were received but without voting rights in decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The research method in writing this thesis uses normative legal research, using secondary materials consisting of primary legal materials: Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, Civil Code, Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land, Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, Government Regulation 10 of 2005 concerning Creditor Vote Counting, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet related to Suspension of Debt Payments and tertiary legal materials: Indonesian Language Dictionary and Legal Dictionary. The research method using this normative legal research study aims to obtain the status of separatist creditors in the suspension of debt payments and legal protection of separatist creditors whose claim rights are received but without voting rights. This study uses a normative juridical type by using secondary data consisting of primary legal materials: laws and regulations, the sources of legal materials specifically on the Bankruptcy Law and Suspension Of Debt Payments, Civil Code, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet related to suspension of debt payments and tertiary legal materials: Indonesian language dictionary and law dictionary. The results of this study a). Separate creditor status Separate creditors in suspension of debt payments are creditors holding rights to material guarantees, such as pledges, fiduciary guarantees, mortgages, mortgages, or other collateral rights to property, who have rights such as participating in voting or voting either for provide permanent suspension of debt payments or peace proposals in suspension of debt payments, b) legal protection to separatist creditors of PT. Bank Qnb Indonesia, TBK and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch whose claim rights are received and recognized by the Supervisory Judge and Management in suspension of debt payments get legal protection, namely getting their rights which have been granted by Article 229 letter b *juncto* 281 letter b of the Bankruptcy and Suspension Of Debt Payments, namely getting voting rights, and being able to participate in voting or voting related to the provision of permanent suspension of debt payments and peace proposals submitted by suspension of debt payments debtors.

Keywords: Legal protection, Separatist Creditors, Suspension Of Debt Payments.